

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Kajian literatur adalah ringkasan dari penelitian sebelumnya, seperti jurnal, buku, atau dokumen lainnya, yang menjelaskan kondisi saat ini dan sebelumnya tentang topik penelitian.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya Indonesia Mencapai Program Sustainable Development Goals Ke-13 Melalui Pelindo Dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Di Wilayah Pelabuhan	Anugerah Perdana	Membahas tentang upaya Indonesia dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-13, yang berkaitan dengan aksi terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca.	Menekankan pada kerangka pemikiran rezim internasional, pembangunan berkelanjutan, dan konsep pelabuhan berkelanjutan. Sementara peneliti lebih fokus pada identifikasi dan analisis upaya pemerintah serta menilai efektivitas kebijakan dan programnya.
2	Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Bandung - Kawasaki Dalam Penerapan	Muhammad Arief Rahman Haruddin	Fokus pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.	Lebih spesifik tentang kerjasama Bandung-Kawasaki dan penerapannya dalam konteks lingkungan, sedangkan peneliti

	Agenda Lingkungan Sustainable Development Goals: Climate Change			lebih luas, menilai upaya pemerintah Indonesia secara keseluruhan terhadap SDGs 13.
3	Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca, Kinerja Lingkungan, Dan Nilai Perusahaan	Dian Yuni Anggraeni	Menekankan pentingnya pengungkapan emisi gas rumah kaca oleh perusahaan. - Mengkaji hubungan antara pengungkapan emisi gas rumah kaca, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan.	Berfokus pada tingkat perusahaan, tidak secara langsung membahas kebijakan dan program pemerintah terkait emisi gas rumah kaca. - Tidak secara eksplisit menghubungkan pengungkapan emisi gas rumah kaca dengan pencapaian SDGs13.
4	Realisasi Penanganan Perubahan Iklim Di Indonesia Melalui Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs): Tujuan-13.1.3	Muh. Rizky Hikmatullah Idrus, Usi Alfiani Nur	Mengkaji realisasi penanganan perubahan iklim di Indonesia melalui implementasi SDGs 13.1.3. - Menekankan pentingnya penguatan ketahanan dan resiliensi terhadap	Tidak secara langsung membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. - Berfokus pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim, tidak pada aspek mitigasi.

			perubahan iklim dan bencana terkait.	
5	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	Wahyudi	Menekankan pentingnya mitigasi emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim. - Membahas berbagai strategi mitigasi emisi gas rumah kaca di sektor energi dan kehutanan	Tidak secara spesifik membahas upaya pemerintah Indonesia dalam implementasi SDGs13. - Kurang fokus pada aspek kebijakan dan regulasi terkait mitigasi emisi gas rumah kaca.

Literatur pertama yaitu Skripsi yang ditulis oleh Anugerah Perdana dengan Judul “Upaya Indonesia Mencapai Program *Sustainable Development Goals* Ke-13 Melalui Pelindo Dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Di Wilayah Pelabuhan”, penelitian ini menggali bagaimana Indonesia, melalui Pelindo, berupaya mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-13 dengan fokus mengurangi emisi gas rumah kaca di area pelabuhan. Dengan latar belakang perubahan iklim yang semakin dirasakan di seluruh dunia dan menjadi fokus utama dalam pertemuan internasional, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, berlandaskan pada teori rezim internasional, pembangunan berkelanjutan, dan konsep pelabuhan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kepatuhan negara terhadap rezim internasional, yang ditandai dengan aksi nyata dalam penerapan kebijakan dan peraturan. Sebagai contoh, penggunaan shore power connection di pelabuhan menunjukkan implementasi langsung dari SDGs dalam konteks perubahan iklim, khususnya untuk mengatasi peningkatan emisi gas rumah kaca global. Studi ini menyoroti keterkaitan antara kebijakan lokal dan inisiatif global dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Kemudian literatur kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arief Rahman Haruddin dengan judul “Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Bandung - Kawasaki Dalam Penerapan Agenda Lingkungan *Sustainable Development Goals: Climate Change*”, lebih membahas mengenai Sister City yang mana merupakan konsep di mana dua kota di negara yang berbeda, dengan kondisi serupa, berkolaborasi untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi. Sebagai contoh, pada 2016, Bandung di Indonesia dan Kawasaki di Jepang menandatangani Memorandum of Understanding untuk kerjasama lingkungan dalam rangka Pembangunan Rendah Karbon. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Bandung dan Kawasaki bekerjasama dalam mencapai tujuan lingkungan yang terkait dengan Sustainable Development Goals. Untuk memahami mekanisme kerjasama ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data dari situs web, berita, buku, dan sumber lain. Hasilnya mengungkap bagaimana kedua kota ini melaksanakan program bersama untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Sedangkan penelitian ini menganalisa tentang menilai upaya pemerintah Indonesia secara keseluruhan terhadap SDGs 13, termasuk identifikasi dan analisis upaya pemerintah serta menilai efektivitas kebijakan dan programnya.

Literatur Ketiga Enelitian Yang Berjudul "Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca, Kinerja Lingkungan, Dan Nilai Perusahaan" Oleh Dian Yuni Anggraeni Mengkaji Hubungan Antara Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Oleh Perusahaan, Kinerja Lingkungan, Dan Nilai Perusahaan. Penelitian Ini Menggunakan Data Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan emisi GRK oleh perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor menghargai perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan emisi GRK mereka dan menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Kinerja lingkungan perusahaan juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor menghargai perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik, seperti penggunaan energi yang efisien dan pengurangan limbah. Hubungan antara pengungkapan emisi GRK dan nilai perusahaan diperlemah oleh kinerja lingkungan yang buruk. Hal ini menunjukkan

bahwa investor lebih menghargai perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik, bahkan jika mereka tidak mengungkapkan emisi GRK secara lengkap.

Literatur ke empat Penelitian berjudul "Realisasi Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia Melalui Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs): Tujuan 13.1.3" oleh Muh. Rizky Hikmatullah Idrus dan Usi Alfiani Nur mengkaji upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim melalui penerapan TPB/SDGs 13.1.3. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani perubahan iklim dengan mengadopsi berbagai kebijakan dan program strategis. Ini termasuk penetapan target emisi gas rumah kaca, pengembangan strategi nasional pengendalian perubahan iklim, penguatan kelembagaan dan koordinasi, peningkatan pendanaan dan investasi, serta pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah telah menghasilkan beberapa kemajuan positif. Misalnya, terdapat penurunan laju deforestasi, peningkatan penggunaan energi terbarukan, penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Tantangan tersebut termasuk keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya infrastruktur dan teknologi yang mendukung. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun ketahanan dan resiliensi terhadap perubahan iklim di Indonesia. Hanya melalui upaya kolaboratif, Indonesia dapat mencapai target SDGs 13.1.3 dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Kesimpulan ini menggarisbawahi bahwa meskipun telah ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dan memaksimalkan potensi kolaborasi dalam penanganan perubahan iklim.

Literatur Ke Lima Penelitian Berjudul "Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca" Oleh Wahyudi Membahas Strategi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Secara Umum, Dengan Fokus Pada Sektor Energi Dan Kehutanan. Hasil Penelitian Ini Menemukan Bahwa Emisi GRK, Terutama CO₂, Menjadi Penyebab Utama Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim. Dampak Negatifnya Sudah Terasa Di

Berbagai Sektor, Seperti Naiknya Permukaan Laut, Perubahan Pola Cuaca, Dan Meningkatnya Frekuensi Dan Intensitas Bencana Alam. Dan Upaya Mitigasi GRK Harus Dilakukan Secara Komprehensif Dan Berkelanjutan. Hal Ini Membutuhkan Kerjasama Dari Berbagai Pihak, Termasuk Pemerintah, Sektor Swasta, Dan Masyarakat. Untuk Strategi Mitigasi GRK Yang Dibahas Dalam Penelitian Ini Meliputi: Meningkatkan Efisiensi Energi dengan Mengurangi Konsumsi Energi Melalui Penggunaan Teknologi Yang Lebih Hemat Energi Dan Menerapkan Kebijakan Yang Mendorong Penghematan Energi. Beralih Ke Energi Terbarukan Mengganti Penggunaan Bahan Bakar Fosil Dengan Sumber Energi Terbarukan Seperti Energi Surya, Angin, Air, Dan Panas Bumi. Melestarikan Hutan Berperan Penting Dalam Menyerap CO₂ Dari Atmosfer. Upaya Pelestarian Hutan Termasuk Reforestasi, Pengelolaan Hutan Lestari, Dan Pencegahan Kebakaran Hutan. Dan Mengembangkan Teknologi Rendah Emisi Menerapkan Teknologi Yang Menghasilkan Emisi GRK Lebih Rendah, Seperti Teknologi Penangkap Dan Penyimpanan Karbon (CCS). Penelitian Ini Juga Menekankan Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Perubahan Iklim Dan Pentingnya Mitigasi GRK, Memperkuat Kebijakan Dan Regulasi Yang Mendorong Mitigasi GRK, dan Meningkatkan Investasi Dalam Teknologi Dan Infrastruktur Ramah Lingkungan.

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan proses penelitian ini, diperlukan dasar yang mendukung analisis. Untuk mengarahkan penelitian ini, sangat penting untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pemikiran konseptual sebelum mengemukakan ide-ide yang akan membahas topik penelitian. Dengan menggunakan perspektif para pakar yang terlibat dalam penelitian ini, kerangka konseptual ini bertujuan untuk membantu pemahaman dan analisis masalah. Akibatnya, penulis akan menciptakan pemahaman dan menggunakan konsep dan teori yang berkaitan dengan subjek penelitian.

2.2.1 Environment Security

Konsep 'ruang lingkungan' pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an sebagai konsep akademis. Konsep ini disebut sebagai 'ruang pemanfaatan lingkungan' oleh Siebert pada tahun 1982 dan Opschoor pada tahun 1987. Menurut Opschoor, 'ruang pemanfaatan lingkungan' mencerminkan bahwa pada titik tertentu di waktu, ada batasan jumlah tekanan lingkungan yang dapat ditangani oleh ekosistem bumi tanpa kerusakan permanen pada sistem ini atau pada proses pendukung kehidupan yang memungkinkannya. 'Ruang pemanfaatan lingkungan' terdiri dari 'stok' (sumber daya terbarukan, semiterbarukan, dan tidak terbarukan) dan 'sink' (kapasitas untuk menyerap dampak manusia).

Komunitas akademik, politik, dan militer lebih menyadari konsep keamanan setelah Perang Dingin berakhir. Keamanan adalah manusia. Untuk membuat masa depan yang berkelanjutan, manusia harus memperhatikan lingkungannya. Konsep keamanan lingkungan hanya muncul dalam diskusi penelitian internasional tetapi tidak pernah digunakan untuk menganalisis (Graeger, 1996).

Keamanan lingkungan, juga dikenal sebagai keamanan lingkungan, mengacu pada kelangsungan hidup lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dengan tiga komponen utama: 1) mencegah atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia, 2) mencegah atau menanggapi konflik yang disebabkan oleh masalah lingkungan, dan 3) mempertahankan integritas lingkungan karena prinsip moral (Glenn et al., 1998, hal. 17).

Lingkungan hidup adalah masalah yang paling meluas di antara negara-negara, dan keamanannya merupakan aspek penting dari perdamaian, keamanan nasional, dan hak asasi manusia. Sepertiga tutupan lahan dunia saat ini akan berubah dalam seratus tahun ke depan. Akibatnya, dunia akan menghadapi pilihan yang semakin sulit antara konsumsi, jasa ekosistem, restorasi, pelestarian, atau degradasi; keamanan lingkungan akan menjadi pilar keamanan nasional. yang mencakup hubungan dan perubahan antara manusia dan sumber daya alam (L Hans, 2008).

Keamanan lingkungan merupakan antangan utama menyangkut perubahan lingkungan global, dengan fokus pada interaksi antara ekosistem dan manusia,

dampak perubahan lingkungan global terhadap degradasi lingkungan, dampak peningkatan permintaan sosial terhadap sumber daya, jasa ekosistem, dan barang lingkungan. Kemudian, keamanan manusia merupakan keamanan yang berbeda aspek-aspek seperti keamanan sosial atau politik. Dalam konteks ini, Nilai-nilai yang terancam adalah kelangsungan hidup manusia dan kualitas hidupnya. Objek yang relevan dari keamanan lingkungan adalah sistem yang kompleks dan adaptif dengan dua komponen utama - sosial, yang ditandai dengan niat manusia, dan ekologi, yang muncul tanpa niat keduanya telah berinteraksi secara historis, dan masyarakat sangat menentukan komponen ekologi lanskap dari sistem tersebut. menggambarkan kesatuan unsur-unsur tanah, udara, dan air yang membuat manusia nyaman untuk tinggal dan hidup.

Pengertian keamanan lingkungan dikembangkan dari perspektif ekologi sistem, yaitu dengan mengacu pada ancaman terhadap sistem sosial-ekologi dan jasa ekosistem. Keseluruhan konsepsi keamanan lingkungan didasarkan pada beberapa prinsip umum interaksi manusia dengan lingkungan:

- Kesejahteraan manusia memiliki beberapa komponen utama: kebutuhan material dasar untuk kehidupan yang baik, kebebasan dan pilihan, kesehatan, hubungan sosial yang baik, dan keamanan pribadi.
- Bagaimana kesejahteraan diekspresikan dan dialami adalah hal yang penting tergantung pada teks dan situasi, yang mencerminkan sosial dan faktor pribadi seperti geografi, ekologi, usia, gen, dan budaya. Konsep-konsep ini sangat kompleks dan sarat nilai.
- Ekosistem sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraannya. melalui penyediaan, pengaturan, dan budaya, dan layanan pendukung. Bukti dalam beberapa dekade terakhir tentang meningkatnya dampak manusia terhadap sistem ekologi di seluruh dunia menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi perubahan ekosistem bagi kesejahteraan manusia.
- Kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan melalui keberlanjutan. interaksi manusia dengan ekosistem atas dasar instrumen, lembaga, organisasi, dan teknologi yang tepat. Penciptaan hal-hal tersebut melalui partisipasi dan transparansi dapat memberikan kontribusi terhadap kebebasan dan pilihan

masyarakat serta peningkatan keamanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. • Ada jalur langsung dan tidak langsung antara lingkungan dan perubahan sistem dan kesejahteraan manusia, apakah mereka positif atau negatif. Dampak tidak langsung ditandai dengan jaringan sebab-akibat yang lebih kompleks, yang melibatkan benang merah sosial, ekonomi, dan politik.

Beberapa contoh fungsi lingkungan dan sumber daya alam dalam konteks keamanan lingkungan adalah sebagai berikut, menurut teori keamanan lingkungan:

1. Sumber daya alam yang terbatas dapat menyebabkan ketidakstabilan dan konflik di tingkat lokal, nasional, dan global. Karena itu, Sangat penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari konflik dan ketidakstabilan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan.
2. Perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dapat berdampak pada keamanan nasional dan internasional, dan dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan di berbagai wilayah, seperti konflik tentang sumber daya air dan lahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana perubahan iklim dan beradaptasi dengan konsekuensi dari perubahan iklim.
3. Untuk mengatasi ancaman lingkungan, kerja sama internasional sangat penting untuk stabilitas. Menurut Hanifan (2019), kerjasama internasional dapat membantu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengatasi masalah lingkungan yang melintasi batas negara.

Oleh karena itu, hutan, sebagai bagian dari lingkungan dan sumber daya alam, sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

2.2.2 Green Politics

Green Politics atau Politik Hijau adalah pendekatan politik yang menekankan pentingnya kelestarian lingkungan, keberlanjutan, dan keseimbangan ekosistem dalam kebijakan publik. Dalam konteks hubungan internasional, green politics sering diintegrasikan dengan diplomasi lingkungan, di mana negara-negara bekerja

sama untuk mengatasi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari teori politik hijau adalah menjamin kelestarian lingkungan untuk generasi berikutnya. Teori hijau menekankan bahwa politik harus menangani masalah lingkungan. ikut serta dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, terutama dalam hal menjaga keseimbangan sumber daya, dengan menggunakan berbagai prinsip dan prinsip dari teori politik hijau sebagai landasan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya politik hijau dianggap sebagai salah satu ide yang mendorong kemajuan teori sosial politik modern.

(Robbins, P. 2012). menjelaskan bahwa ekologi politik melibatkan pemahaman bahwa masalah-masalah lingkungan tidak hanya bersifat ekologis tetapi juga memiliki dimensi politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Green Politics, sebagai bagian dari ekologi politik, menegaskan bahwa solusi terhadap masalah lingkungan harus melibatkan analisis dan intervensi pada struktur kekuasaan yang ada. Ini termasuk mempertanyakan siapa yang mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tertentu dan siapa yang menderita akibat kebijakan lingkungan yang ada.

Matthew membedakan environmentalism dari teori hijau. Secara umum, para pemerhati lingkungan menerima bahwa struktur politik, sosial, ekonomi, dan normatif dunia ada dan berusaha menyelaraskan isu lingkungan dengannya. Ini berbeda dengan teori hijau, yang menganggap struktur ini sebagai penyebab utama krisis lingkungan dan berpendapat bahwa struktur ini harus menghadapi tantangan.

Dalam hubungan internasional, para aktivis lingkungan tetap sama: mereka mengakui adanya negara dan sistem politiknya, dan mereka percaya bahwa negara akan memberikan perhatian yang serius terhadap masalah lingkungan. Karena teori hijau cenderung skeptis terhadap negara, aktivis lingkungan berharap negara akan merespons (Matthew, 2001: 236).

Salah satu asumsi utama dari teori hijau adalah bahwa pertama, ia menolak pendekatan antroposentrik atau berpusat pada manusia dan menitikberatkan pada pendekatan ekologis. Metode ini menekankan stabilitas komposisi ekologis dan komunitas biotik sebagai satu keseluruhan biosfer. Penggunaan sumber daya alam oleh manusia harus bertanggung jawab, dan ada upaya untuk menjaga

keseimbangan alam. Ekosentrisme, seperti yang dinyatakan oleh Eckersley dalam Burchill & Linklater (2009), adalah karakteristik politik hijau, yang merupakan penolakan terhadap perspektif dunia yang berpusat pada manusia, yang hanya menempatkan nilai moral atas manusia dan juga memprioritaskan ekosistem setiap makhluk hidup. Menurut Goodin, "nilai teori hijau" berasal dari fakta bahwa segala sesuatu memiliki sejarah yang diciptakan oleh proses alami, bukan rekayasa manusia (Burchill & Linklater, 2009: 338).

Menurut Rani (2013), salah satu hal yang paling penting adalah mengakui bahwa ada makhluk hidup di Bumi. Kehidupan di Bumi terdiri dari manusia, keanekaragaman hayati, dan komponen alam lainnya. Selama bertahun-tahun, manusia telah hidup bersama dengan berbagai makhluk hidup lainnya. sadar bahwa hubungan antara manusia dan alam sudah ada sejak lama, sehingga kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan alam, dan kehidupan manusia dapat berdampak pada kelestarian lingkungan hidup.

Daya dukung Bumi terus menurun sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam oleh manusia. Krisis lingkungan hidup dan praktik pembangunan yang tidak sustainable menyebabkan sumber daya alam seperti air tidak dapat digunakan karena bahan kimia limbah produksi perusahaan telah mengkontaminasinya. Lingkungan hidup terbatas. Meskipun sumber daya yang ada sangat terbatas, eksploitasi manusia telah menyebabkan daya dukung bumi semakin berkurang. Jika tidak ditangani, krisis lingkungan hidup akan semakin parah dan menempatkan kehidupan manusia dalam bahaya. Ini menunjukkan lebih jelas bagaimana kehidupan manusia sangat bergantung pada dan dipengaruhi oleh alam, begitupun bagaimana aktifitas manusia akan mempengaruhi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah masalah nasional dan global. Menurut Dyer (2020), pencemaran udara, polusi air, dan perubahan iklim adalah masalah lingkungan hidup yang dapat melintasi batas negara. Transboundary, atau lintas batas negara, adalah salah satu ciri masalah lingkungan hidup. Ini juga melibatkan banyak pihak, baik yang menyebabkan krisis lingkungan hidup maupun yang menyelesaikannya (Eckersley, 2007).

Namun, teori HI konvensional mengutamakan negara sebagai aktor utama, yang bertentangan dengan karakteristik masalah lingkungan transboundary.

Kedaulatan negara tidak lagi menggambarkan realitas yang terjadi dalam dunia internasional khususnya permasalahan lingkungan hidup global (Dyer, 2020).

Menurut teori ini, desentralisasi adalah langkah yang diperlukan untuk menangani krisis lingkungan hidup (Dyer, 2020). Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pengalihan kekuasaan atau kewenangan dari tingkat pusat atau tingkat teratas ke daerah atau tingkat lokal yang lebih kecil. Desentralisasi dianggap sebagai solusi untuk masalah lingkungan hidup (Dyer, 2020). Negara memberikan desentralisasi kepada aktor di wilayah yang dianggap mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

Teori ini secara garis besar membahas hubungan antara manusia dan alam. bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Orang-orang sekarang menghadapi krisis lingkungan hidup sebagai akibat dari upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dieksploitasi terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Krisis lingkungan mengancam tidak hanya keberlangsungan alam tetapi juga kehidupan manusia. Aktivitas manusia yang merusak alam mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, bukan memenuhi kesejahteraan manusia. Jadi, cara manusia melihat Bumi harus berubah. Mengakui bahwa manusia hidup bersama alam dan bahwa alam itu lestari akan membantu kehidupan manusia sekarang dan di masa depan.

Andrew Dobson membagi karakteristik teori politik hijau menjadi dua bidang utama. Pertama, menolak definisi antroposentrisme Eckersley. Kedua, salah satu faktor yang menyebabkan krisis lingkungan alam adalah kebutuhan akan batasan pertumbuhan. Sebuah perspektif ini menggambarkan ekspansi ekonomi yang pesat selama dua puluh tahun terakhir, yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang terus terjadi hingga saat ini (Andrew Dobson, 2007: 43 & 53).

Dalam konteks keadilan, Green Politics menuntut distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan beban lingkungan. Robbins menekankan pentingnya memperhatikan bagaimana kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat secara tidak proporsional. Misalnya, kebijakan pengurangan emisi di negara maju tidak boleh mengakibatkan "degradasi lingkungan ekspor" ke

negara berkembang. Ini membutuhkan kerjasama internasional yang lebih besar dan kebijakan yang mempertimbangkan keadilan transnasional.

Dalam diplomasi lingkungan, negara-negara diharapkan tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional tetapi juga pada kepentingan global dalam mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Robbins menyarankan bahwa pendekatan ini harus melibatkan negosiasi yang mendorong transparansi, pertukaran informasi, dan pembangunan kapasitas di semua tingkatan. Politik Hijau dalam arena internasional mendukung pembentukan aliansi lintas negara yang bisa memperkuat tindakan kolektif dan memastikan bahwa negara-negara besar dan kecil sama-sama terlibat dalam solusi lingkungan.

2.2.3 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Karena industrialisasi dan modernisasi, pertumbuhan ekonomi yang cukup besar telah berdampak besar pada kelestarian lingkungan hidup. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa produksi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dikombinasikan dengan keterbatasan sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di seluruh dunia di masa depan. Buku tahun 1972 "The Limit to Growth" juga menggambarkan fenomena pembangunan ekonomi yang serupa, menyimpulkan bahwa potensi alam yang terbatas menghalangi pertumbuhan ekonomi, sehingga produksi berkelanjutan yang bergantung pada sumber daya alam tidak dapat dilakukan (Meadows et al, 1972). Hal inilah yang mendorong pembangunan yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam.

Pembangunan, juga dikenal sebagai "Development", adalah sebuah proses transformasi dari kemampuan manusia yang lebih baik. Proses ini mencakup membangun metode baru untuk menyelesaikan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan berusaha kreatif untuk mencapai tujuan baru (Peet 1999). Todaro dan Smith mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang melibatkan perubahan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan institusional dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kesenjangan, dan penghapusan kemiskinan (Smith 2006). Namun, hubungan budaya antar negara adalah salah satu aspek penting dari pembangunan yang terkait dengan globalisasi.

Ini adalah alasan mengapa diperlukan paradigma pembangunan global yang luas, yang menggabungkan konsep pembangunan dan keberlanjutan.

Keberlanjutan (sustainability) biasanya berarti kemampuan untuk mempertahankan beberapa entitas, hasil, atau proses secara bertahap (Basiago 1999). Namun, dalam konteks pembangunan, keberlanjutan berarti meningkatkan dan mempertahankan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan manusia, seperti sistem yang sehat secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Mensah 2019). Akibatnya, memahami pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh akan melibatkan kebijakan publik dan agenda pembangunan global. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan akan berkembang menjadi sebuah paradigma sekaligus konsep pembangunan yang memungkinkan peningkatan taraf hidup tanpa mengganggu ekosistem Bumi atau menimbulkan masalah lingkungan (Browning and Rigolon 2019).

Kemiskinan dapat mewariskan penyakit, kekurangan gizi, dan ketidakmampuan untuk menikmati pendidikan kepada generasi berikutnya, menyebabkan generasi berikutnya menghadapi masalah sosial. Oleh karena itu, kemiskinan akan terus menjadi masalah bagi negara dan masyarakat. Tujuan utama negara adalah pembangunan, jika negara terus berkembang, ia akan maju. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Hubungan manusia dengan lingkungan dan hubungan antara elemen bio-fisik, teknis, dan sistem manusia sangat kompleks dan dinamis. Akibatnya, manusia menghadapi kesulitan dalam menemukan tempat operasi yang aman untuk pertumbuhan. Ini memungkinkan pendidikan sektor kunci untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global saat ini dan di masa depan, seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim.

Laporan Brundtland, *Our Common Future*, yang diterbitkan pada tahun 1987 oleh World Commission on Environment and Development, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Assembly 1987). Hasil laporan bertujuan untuk menjembatani hubungan antara

masalah perkembangan ekonomi dan kestabilan lingkungan yang begitu signifikan. Secara khusus, pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk memungkinkan kemajuan ekonomi sambil mempertahankan nilai-nilai lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kerangka pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan hidup dan strategi pembangunan.

Pada tahun 1992, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) diadakan di Rio de Janeiro dengan tujuan mendorong peningkatan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pelestarian dan perlindungan sistem ekologi Bumi, yang juga dikenal sebagai The Earth Summit. Konferensi ini menghasilkan banyak hasil luaran, termasuk pembentukan lembaga baru yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, seperti *United Nations Commission on Sustainable Development* (IISD, 2023).

Konsep keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi memerlukan minimal tiga alasan utama: moral, ekologi, dan ekonomi. Tidak mengelola sumber daya alam secara destruktif sehingga merusak lingkungan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh generasi berikutnya adalah moral. Ekonomi, keberlanjutan ekonomi dibatasi pada kesejahteraan antar generasi; keanekaragaman hayati dan sumber daya alam memiliki nilai ekologis yang tinggi sehingga aktivitas ekonomi yang memanfaatkan keanekaragaman harus memperhatikan nilai ekologis tersebut dan tidak mengancam eksistensi (Fauzi 2004). Ini juga erat dikaitkan dengan hasil integrasi antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Kolk, pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui integrasi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial (Kolk 2016). Tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, menurut Taylor, terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dasar pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama ini yaitu keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*); keberlanjutan sosial (*social sustainability*); dan kelestarian lingkungan hidup (*environmental sustainability*).

Berkaitan dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir yang kemudian dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tindaklanjut dari Millennium Development Goals (MDGs). MDGs merupakan suatu program pembangunan berkelanjutan secara global yang memiliki 8 tujuan serta berlaku sejak tahun 2000 hingga 2015. Tujuan program adalah untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi lingkungan, dan diskriminasi perempuan (WHO 2018). Namun, program SDGs dimasukkan ke dalam agenda pembangunan karena ketidakmampuan untuk mencapai kedelapan tujuan tersebut.

Dilansir dari Isharto et al. (2016), Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan, SDGs mencakup empat tujuan:

1. Tanpa kemiskinan tidak ada lagi kemiskinan di seluruh dunia;
2. Tanpa kelaparan tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan; dan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan hidup bagi orang-orang di segala usia.
4. Pendidikan berkualitas menjamin bahwa orang-orang di segala usia menerima pendidikan yang berkualitas.
5. Kesetaraan gender berarti mendapatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan ibu.
6. Air bersih dan sanitasi: menjamin bahwa semua orang memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Energi bersih dan terjangkau: menjamin bahwa semua orang memiliki akses ke sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern.
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak: mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang menghasilkan lapangan kerja yang cukup dan produktif.
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur berarti menciptakan infrastruktur yang baik, mendorong industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan berarti mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara di seluruh dunia.

11. Keberlanjutan kota dan komunitas berarti membangun kota dan pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab berarti menjamin bahwa konsumsi dan pola produksi terus berlanjut.
13. Aksi terhadap iklim berarti mengambil tindakan cepat untuk memerangi dampak perubahan iklim.
14. Kehidupan bawah laut adalah melestarikan dan menjaga keberlangsungan dan kehidupan sumber daya laut.
15. Kehidupan di darat mencakup melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, pengurangan tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, dan mencegah kerugian yang tidak terduga.
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian berarti meningkatkan keamanan dalam masyarakat untuk kemajuan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua orang, termasuk lembaga, dan membuat semua orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan membangun institusi yang efisien, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kerja sama internasional untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2.3 Asumsi

Berdasarkan perumusan masalah diatas serta teori – teori diatas maka dapat kita tarik asumsi penelitian sebagai berikut :

“Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani emisi gas rumah kaca diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan tujuan dari strategi yang dibentuknya”

2.4 Kerangka Analisis

Gambar 2.1 Kerangka Analisis

